



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Babak Belur Saya Digebukin

Gambir, Warta Kota

Heboh Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta masih berlanjut. Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua 'menyemprot' anggota komisi, William Aditya Sarana dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), karena membawa masalah itu ke publik, padahal belum dibahas di Dewan.

Inggard meminta William untuk memakai tata krama dalam menyampaikan aspirasi. "Sebagai anggota dewan itu perlu punya rasa harga diri dan punya tata krama dalam rangka menyampaikan aspirasi. Aspirasi itu boleh keluar setelah kita melakukan pembahasan. Jangan sampai belum melakukan pembahasan, sudah ramai di koran," kata politikus dari Fraksi Partai Gerindra itu saat rapat Kebijakan Umum

Prioritas Plafon Sementara (KUA-PPAS) dengan Satpol PP DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI pada Kamis (31/10).

Sehari sebelumnya William dan Idris Ahmad menggelar jumpa pers mengkritisi usulan anggaran yang diajukan

Pemprov DKI Jakarta dalam KUA-PPAS. Beberapa anggaran dinilai tidak wajar. Seperti pembelian lem Aibon senilai Rp 82,8 miliar, pulpen Rp 123 miliar dan komputer baru Rp 132 miliar.

Menurut Inggard, hal itu harus dibahas di Dewan lebih dulu. "Saya berharap forum yang kencang itu adanya di ruangan ini. Kalau mau berantem ya berantem di ruangan ini, jangan berantem di luar (lewat pers)," katanya.

"Khususnya pada saudara William, Anda ini kan baru, saya berharap, bukannya nggak boleh ngomong di koran atau di TV, itu boleh saja. Tapi harus jaga tata krama. Itu kan baru KUA-PPAS yang baru disampaikan eksekutif kepada legislatif (rancangan)," tambahnya.

Dikatakan Inggard

"Ketika itu disampaikan, nanti juga akan dibahas. Artinya jangan sampai ada prasangka buruk. Anda kan juga baru di sini (DPRD). Apalagi masih muda kan. Saya berharap Komisi A jangan terlalu maju depan tapi nggak punya arah (kebijakan) yang jelas," tambahnya.

Sebagai pengawas pemerintahan, kata Inggard, hubungan antara legislatif dengan eksekutif merupakan mitra kerja. Bila ada persoalan yang harus dibicarakan baik-baik, harusnya berbicara langsung dengan eksekutif sehingga tidak menimbulkan polemik. "Kalau perlu ngomong di dalam, jadi nggak ricuh dan bilang nggak pantas ini," katanya.

Terima dikritik

Seusai rapat, anggota Komisi A dari Fraksi PSI William Aditya Sarana baru menanggapi 'tegaran' Inggard tersebut. "Diterima saja kritik bang Inggard. Saya juniornya, jadi saya terima nasihatnya dan saya harus banyak belajar dari beliau," ujarnya.

Namun William bersikukuh pada prinsipnya, bahwa transparansi anggaran merupakan harga mati yang harus diketahui oleh masyarakat.

William mengatakan, berkaca pada pengalaman Gubernur DKI Jakarta sebelumnya yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, pemerintah selalu mengunggah dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di website. Bahkan saat dokumen itu dibahas di setiap komisi dalam bentuk Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) di setiap komisi, masyarakat sudah bisa mengaksesnya melalui website resmi, apbd.jakarta.go.id.

"Kalau diunggah saat se-

mua sudah selesai, buat apa kami kritisi, udah telat dong istilahnya. Apalagi kalau sudah diketok (disetujui), ngapain kami teriak-teriak. Justru teriaknya sekarang saat pembahasan," kata William.

Menurutnya, posisi PSI di DPRD DKI Jakarta memang bertugas untuk mengkritisi dan memprotes kebijakan pemerintah daerah bila menemukan kejanggalan dalam penganggaran.

Maka, William akan tetap teguh dalam mengawasi anggaran ke depan meski dikritik politikus senior. "Intinya kami jalani sajalah mengalir ke depannya, sudah digebuk-gebukin (dikritik) dan babak belur ini saya," katanya.

Buka sejak dini

Terpisah, Ketua Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) DPRD DKI Jakarta Wibi Andriano meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membuka anggaran sejak dini. Menurut dia, hal itu dilakukan untuk meredakan polemik yang terjadi di masyarakat.

"Komponennya dipublikasikan saja kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya ada apa di balik ini," ujar Wibi saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (31/10) petang.

Wibi mengatakan, sebelum kasus anggaran lem Aibon senilai Rp 82,8 miliar merebak di masyarakat, Partai NasDem sudah mengingatkan Anies untuk membuka persoalan tersebut kepada masyarakat.

Bahkan Wibi sempat berkonsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ihwal keterbukaan anggaran yang belum selesai. Menurut Kemendagri, kata Wibi, keterbukaan informasi soal

anggaran yang belum selesai dibahas itu menjadi hak dari masing-masing pemerintah daerah.

"Saya sempat bertanya kepada staf Kemendagri ketika Bimbingan Teknis (Bimtek) di Bandung. Mereka menilai, tidak ada kewajiban pemerintah mempublikasikan rancangan KUA-PPAS. Tapi ketika sudah selesai pembahasan KUA-PPAS memang wajib dibuka," ujarnya.

Jangan menyalahkan

Sedangkan anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, menyatakan, jika memang Anies ingin memperbaiki sistem e-budgeting APBD, tidak perlu menyalahkan sistem yang sudah ada saat ini. Pasalnya, sistem itu warisan era Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama saat menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur pada tahun 2012.

Gembong mengatakan, zaman semakin modern dan canggih. Dengan demikian, memang perlu pembaruan pada sistem elektronik APBD tersebut. "Kalau memang lebih baik, monggo. Tapi jangan menafikan sistem yang sudah ada. Kalau tujuannya untuk memperbaiki sistem yang ada, kami hormati. Karena zaman berubah, setiap saat ada perubahan teknologi lebih canggih, kita senang hati," katanya.

Ia menegaskan, memang sudah seharusnya Anies memperbaiki sistem agar semakin baik dan lebih mudah diakses publik. Namun, Gembong menekankan, jangan sampai Anies terus menyalahkan sistem yang ada. "Kalau mau membuka sistem baru, jangan kemudian seolah-olah menyalahkan sistem yang sudah ada," ucap Ketua Fraksi PDI-P di DPRD DKI itu.

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Babak Belur Saya Digebukin

Cegah korupsi

Sementara itu mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebut, Gubernur DKI Anies Baswedan terlalu pintar. Hal itu disampaikan Ahok saat ditanya soal pernyataan Anies yang menyebut e-budgeting Pemprov DKI saat ini tidak smart. E-budgeting tersebut adalah warisan era kepemimpinan Joko Widodo-Ahok.

"Aku sudah lupa definisi smart seperti apa karena Pak Anies terlalu over smart," ujar Ahok saat dihubungi Kompas.com, Kamis (31/10).

Ahok menjelaskan, sistem e-budgeting yang digunakan saat dia menjabat sebagai gubernur bisa mengetahui detail anggaran apa pun, seperti lem Aibon, pulpen, dan lainnya.

"Bisa tahu beli apa saja dari perencanaan awal sudah masuk dan sistem semua, tidak bisa asal masukkan," kata dia.

Sistem e-budgeting yang dia terapkan, lanjut Ahok, juga bisa mengetahui orang-orang yang memasukkan anggaran yang dinaikkan (mark up). "Kan sistem sudah di-input harga satuan barangnya, kecuali harga satuan semua diubah," ucap Ahok.

"Jadi untuk mencegah korupsi, hanya ada satu kata, yaitu transparansi dengan sistem yang ada," tambahnya. (faf/Kps)

